

TAJUK RENCANA

Bencana Masih Mengancam

BENCANA banjir dan tanah longsor masih menjadi ancaman bagi sejumlah daerah. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini sejumlah daerah, khususnya di Jawa Tengah dan lebih khusus lagi kawasan pantai utara, dilanda banjir besar besar. Longsor juga terjadi di Desa Ketintang Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung, yang mengancam ruas jalan nasional di Desa Caturanom Kecamatan Parakan-Wonosobo.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menyatakan hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sebagian daerah di Indonesia lainnya dalam beberapa hari terakhir dipengaruhi siklus balik dari fenomena Atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO). Menurutnya, fenomena MJO yang serupa angin dingin dari Samudera Hindia itu sebelumnya sudah terjadi pada akhir November hingga pertengahan Desember tahun lalu.

Disebutkan, fenomena MJO yang diikuti oleh bibit Siklon Tropis pada periode tersebut mengakibatkan hujan deras (30-50 mm) sampai memicu bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah selatan Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dampaknya cukup signifikan bahkan menimbulkan korban jiwa.

Potensi hujan deras yang dipicu oleh fenomena MJO ini masih akan berulang di Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari ke depan, setidaknya sampai Dasarian Pertama Februari yang merupakan puncak musim hujan.

Potensi hujan dengan intensitas sangat deras (lebih dari 50 mm) terjadi di Sumatera Barat dan Jawa Barat. Hampir setiap bulan atau seminggu-dua minggu, terjadi cuaca ekstrem seperti hari-hari terakhir ini.

Cuaca buruk buruk juga mengakibatkan dua kapal terombang-ambing dan kandas di Pantai Cipta Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Direktur Polairud Polda Ja-

teng, Kombes Pol Hariadi mengatakan kejadian ini bermula pada Rabu 29 Januari 2025 sekitar pukul 14.00. Upaya evakuasi yang dilakukan gagal akibat kondisi cuaca yang semakin buruk disertai anging kencang.

Menurut Kombes Hariadi, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, kerugian materiil cukup signifikan. Menyikapi kejadian tersebut, Ditpolairud Polda Jateng langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamatan dan pemantauan.

Menyikapi bencana banjir dan tanah longsor yang saat ini masih menjadi ancaman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah maupun DIY sejak beberapa waktu lalu telah melakukan sejumlah antisipasi. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah berhadapan langsung dengan bencana. Hal itu seperti terjadi di Brebes, batang, Pekalongan, Demak, Kudus, dan Grobogan. Di Jawa Tengah bagian tengah, BPBD setempat juga sudah menangani banjir dan longsor, seperti terjadi di Banyumas, Wonosobo dan Temanggung. Termasuk juga sepanjang Sungai Bengawan Solo.

Banjir dan longsor seolah sudah menjadi 'ritual alam' setiap musim penghujan. Berbagai upaya antisipasi dan pencegahan juga telah dilakukan pemerintah daerah. Berbagai sarana dan prasarana juga sudah disiapkan oleh sejumlah pemerintah daerah. Namun masih ada saja korban-korban akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Menghadapi kenyataan tersebut, sikap waspada dan gotong royong menjadi salah satu kunci mencegah korban bencana. Seperti dilakukan Pemkab Sukoharjo, selain sikap waspada dan gotong royong, daerah tersebut juga memberlakukan ronda. Tidak hanya berjaga-jaga di pos ronda, tetapi juga berjaga-jaga di kawasan yang diprediksi berpotensi terjadi bencana. □ - f

Pekan Kerukunan Antarumat Beragama

MINGGU pertama bulan Februari ditetapkan oleh PBB sebagai Pekan Kerukunan antarumat Beragama Sedunia (World Interreligious Harmony Week/WIHM) atas usulan Raja Abdullah II dari Yordania pada tahun 2010. Sempat tidak dirayakan dua kali selama Covid 19, pada tahun 2023 acara tahunan ini mulai dirayakan lagi hingga tahun ini. Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari kerukunan antarumat beragama, yaitu menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, masyarakat yang hidup berdampingan dengan rasa damai dan saling menghormati, serta masyarakat yang saling tenggang rasa dan toleran.

Agama dipandang sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian bagi dunia. Semua agama memiliki misi yang sama bagi keselamatan umat manusia dan alam semesta. Semua agama mengajarkan cinta kasih yaitu cinta pada yang Ilahi, cinta pada sesama, dan cinta pada lingkungan semesta. Disusunnya *Common Word between Us* antara Muslim dan Kristen dilandasi oleh kesamaan perintah dasar untuk mencintai Tuhan dan sesama. PBB kemudian memperluas cakupannya menjadi "mencintai semua yang baik dan sesama" yang menjadi landasan kuat bagi Pekan Kerukunan Antarumat Beragama sedunia.

Deklarasi Istiqlal

Satu tema yang sangat relevan untuk mengisi Pekan Kerukunan Antarumat Beragama ini adalah Deklarasi Istiqlal yang ditandatangani di Jakarta pada 5 September 2024 oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Deklarasi ini disusun berdasarkan keprihatinan atas dehumanisasi dan perubahan iklim. Pertama, dehumanisasi terjadi dalam bentuk konflik dan kekerasan antarmanusia yang meniadakan banyak korban. Kedua, eksploitasi manusia terhadap segala ciptaan lainnya menyebabkan perubahan iklim. Akibat selanjutnya, terjadilah bencana alam, pemanasan global, dan cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Deklarasi Istiqlal memuat empat bu-

Agus Tridiatno

tir pernyataan. Pertama, nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama harus dipromosikan secara efektif untuk menyalurkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian. Jangan sampai nilai-nilai positif yang telah lama dihidupi agama-agama digerus oleh nilai-nilai duniawi yang lebih mempromosikan persaingan, konflik dan kekerasan. Kedua, para pemimpin agama harus bekerja sama dalam menanggapi krisis dehumanisasi dan perubahan iklim itu. Mereka harus



KR-JOKO SANTOSO

tegas untuk menjaga integritas lingkungan alam dan sumber dayanya.

Terowongan Silaturahmi

Satu bangunan monumental adalah Terowongan Masjid Istiqlal dan Katedral di Jakarta. Terowongan bawah tanah dengan panjang 28,3 meter, tinggi 3 meter, lebar 4,1 meter ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 12 Desember 2024. Terowongan ini menarik perhatian masyarakat dan dunia karena dapat menjadi simbol toleransi dan harmoni antarumat beragama, di samping fungsinya untuk mempermudah akses antara Masjid Istiqlal dan Katedral, memudahkan interaksi antara umat Islam yang hadir di Masjid Istiqlal dan umat Katolik yang hadir di Katedral, mempererat hubungan antarumat beragama.

Dibangunnya bangunan-bangunan fungsional sekaligus simbolis semacam ini memudahkan umat untuk mengidupi toleransi dan harmoni tanpa perlu harus berdiskusi atau membaca buku-buku teks. Kerukunan dan harmoni sudah hadir dan nyata dalam bangunan-bangunan monumental tersebut. Semoga di tempat-tempat lain juga sudah ada bangunan simbolis semacam itu. Kalau belum ada, sebaiknya direncanakan untuk membangun bangunan-bangunan simbolis macam itu. ***-d

*)**Dr Agus Tridiatno**, Dosen Purna Tugas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPENS/ISIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirnon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugianto, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr23@yahoo.com, iklankr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan: H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Kritik Pindar dan OJK dalam Ekosistem Keuangan Indonesia

EKOSISTEM keuangan Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kemunculan inovasi teknologi keuangan seperti *financial technology* atau pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online. Pindar menawarkan kemudahan akses ke sumber dana, terutama bagi mereka yang sulit menjangkau layanan perbankan konvensional. Namun, di balik berbagai manfaatnya, pindar juga menjadi persoalan yang serius karena sederet permasalahan, mulai dari bunga yang mencekik, metode penagihan kasar, hingga lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap operasionalnya.

Di sisi lain, OJK sebagai regulator memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkeadilan. Meski OJK telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengawasi pindar, kritik tetap muncul terhadap efektivitas kebijakan dan pengawasannya. Belum lagi maraknya pindar ilegal, kurangnya literasi keuangan masyarakat, dan celah regulasi menjadi tantangan yang terus menghantui sektor ini.

Tulisan ini mencoba untuk mengkritisi pindar dan peran OJK dalam mengelola dan mengawasi ekosistem keuangan, khususnya terkait pindar. Dengan mengevaluasi berbagai aspek, diharapkan muncul rekomendasi yang dapat memperkuat tata kelola dan mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Persoalan Pindar: Antara Manfaat dan Bahaya

Pindar sering dipuji karena mampu menjangkau masyarakat yang *unbankable*, memberi akses terhadap dana dengan proses yang mudah dan cepat. Tetapi, manfaat ini sering dibayangi berbagai permasalahan serius. Salah satu kritik utama terhadap pindar adalah tingginya bunga pinjaman yang sering tidak masuk akal. Banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran utang akibat ketidaktahuan atau kurangnya literasi keuangan terkait skema pinjaman daring.

Selain itu, metode penagihan oleh beberapa penyedia baik pindar legal ataupun ilegal sering kasar (tidak etis) dan melanggar privasi konsumen. Penagihan melalui intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi menjadi masalah yang mencoreng citra layanan ini. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya merugikan konsumen secara individu,

Edo Segara Gustanto

tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di masyarakat.

Lebih jauh, maraknya pindar ilegal yang beroperasi tanpa izin memperburuk situasi secara keseluruhan. Dengan tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap pelaku ilegal, masyarakat kian rentan terhadap penyalahgunaan data dan eksploitasi finansial. Keberadaan platform ilegal ini menimbulkan keresahan yang berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap sektor pinjaman daring secara keseluruhan.

Memaksimalkan Peran OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi operasional pindar. Langkah-langkah seperti penyusunan regulasi, pengawasan terhadap platform yang berizin, serta penindakan terhadap pindar ilegal telah diambil oleh OJK. Namun, usaha OJK dalam menangani hal tersebut masih menjadi pertanyaan besar?

Salah satu kritik terhadap OJK adalah lambatnya penindakan terhadap pindar ilegal yang terus bermunculan. Kurangnya koordinasi dengan pihak berwenang lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kepolisian, juga menjadi kendala dalam memberantas operasional pindar yang tidak terdaftar. Di sisi lain, literasi keuangan masyarakat yang masih rendah menunjukkan upaya edukasi dari OJK dan pemangku kepentingan lainnya belum maksimal.

Selain itu, regulasi yang ada sering dianggap belum cukup tegas untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik tidak etis oleh pindar yang berizin sekalipun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kemunculan pindar justru menciptakan ketimpangan baru dalam sektor keuangan.

Rekomendasi untuk Ekosistem Keuangan yang Lebih Sehat

Untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkeadilan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, OJK harus mem-

perkuat pengawasan terhadap pindar dengan meningkatkan kerjasama lintas institusi untuk memberantas pindar ilegal secara lebih efektif. Pemutusan akses terhadap platform pindar ilegal harus dilakukan secara cepat dan konsisten.

Kedua, literasi keuangan harus menjadi prioritas. OJK bersama lembaga terkait perlu menggenjatkan kampanye edukasi keuangan yang menasar masyarakat luas, termasuk memberi pemahaman tentang risiko pindar dan bagaimana mengenali platform yang legal dan aman.

Ketiga, regulasi yang lebih tegas dan rinci perlu disusun untuk memastikan perlindungan konsumen. Pengawasan terhadap Pindar yang telah berizin juga harus ditingkatkan agar praktik-praktik yang tidak etis dapat diminimalkan.

Penutup

Pindar merupakan inovasi yang memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Namun, tanpa pengawasan yang memadai dan regulasi yang tegas, pindar justru dapat menjadi ancaman bagi ekosistem keuangan. Kritik terhadap pindar dan OJK menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkeadilan. Kolaborasi antara Pemerintah, regulator (OJK), dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang lebih sehat di masa depan. (*)-d

*)**Edo Segara Gustanto**, Mahasiswa Hukum Islam Program Doktor UII /Peneliti Pusat Kajian dan Analisa Ekonomi Nusantara (PKAEN).

Pojok KR

Polda DIY menyita 10 kilogram sabu dari empat bandar di Sidoarjo Jawa Timur.

- **Sita dan Sikat!**

BMKG memprediksi, beberapa hari ke depan masih terjadi hujan deras.

- **Tetap waspada.**

Imbas Pagar Laut, 8 pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang kena sanksi.

- **Hanya itu saja?**

Berabe